

REZIM KEBENARAN DAN POSISI SASTRA DALAM PEMIKIRAN FOUCAULT

Palendika Alandira¹, Ridho Hidayat²

Universitas Islam Sunan Gunung Djati Bandung

¹Email: Palendika27@gmail.com

Diterima: 24 Desember, 2025. Direvisi: 10 Januari, 2026

ABSTRACT

This article discusses the concept of the regime of truth in Michel Foucault's thought and reflects on the position of literature within networks of power–knowledge. Departing from Foucault's critique of the modern understanding of truth as neutral and universal, this study views truth as the product of discursive practices that are always bound to relations of power and specific historical conditions. Within this framework, literature is not positioned merely as an aesthetic object, but as a discursive practice that operates both within and at the margins of regimes of truth. This research employs a qualitative philosophical approach using library research methods and conceptual hermeneutic analysis of Michel Foucault's major works as well as relevant secondary literature. The findings indicate that literature occupies an ambivalent position: it is subject to mechanisms of meaning production regulated by power, yet it also possesses critical potential to disrupt and problematize established truth claims. Through linguistic disobedience, semantic ambiguity, and the formation of alternative subjectivities, literature can be understood as a space for epistemological critique and a praxis of freedom. Thus, this article asserts that, from a Foucauldian perspective, literature is not a source of counter-truth, but rather a reflective field that questions how truth is produced, legitimized, and operated within modern society.

Keywords: Michel Foucault; Regime of Truth; Literature; Discourse; Power; Subjectivity

ABSTRAK

Artikel ini membahas konsep rezim kebenaran dalam pemikiran Michel Foucault serta merefleksikan posisi sastra di dalam jaringan kuasa-pengetahuan. Berangkat dari kritik Foucault terhadap pemahaman modern tentang kebenaran yang dianggap netral dan universal, tulisan ini memandang kebenaran sebagai hasil dari praktik diskursif yang selalu terikat pada relasi kekuasaan dan kondisi historis tertentu. Dalam kerangka tersebut, sastra tidak diposisikan sebagai objek estetis semata, melainkan sebagai praktik wacana yang beroperasi di dalam dan sekaligus di pinggiran rezim kebenaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-filosofis dengan metode studi kepustakaan dan analisis konseptual-hermeneutik terhadap karya-karya utama Michel Foucault serta literatur sekunder yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa sastra menempati posisi ambivalen: ia tunduk pada mekanisme produksi makna yang diatur oleh kekuasaan, tetapi juga memiliki potensi kritis untuk mengganggu dan memproblematisasi klaim-klaim kebenaran yang mapan. Melalui ketidakpatuhan bahasa, ambiguitas makna, dan pembentukan subjektivitas alternatif, sastra dapat dipahami sebagai ruang kritik epistemologis dan praksis kebebasan. Dengan demikian, artikel ini menegaskan bahwa sastra dalam perspektif Foucauldian bukanlah sumber kebenaran tandingan, melainkan medan reflektif yang mempertanyakan cara kebenaran diproduksi, dilegitimasi, dan dioperasikan dalam masyarakat modern.

Kata kunci: Michel Foucault; Rezim Kebenaran; Sastra; Wacana; Kekuasaan; Subjektivitas

PENDAHULUAN

Dalam tradisi filsafat modern, kebenaran kerap dipahami sebagai sesuatu yang netral, objektif, dan terlepas dari relasi kekuasaan. Kebenaran dianggap hadir sebagai hasil korespondensi antara pernyataan dan realitas, sementara bahasa diposisikan sebagai medium transparan yang sekadar merepresentasikan dunia. Namun, pemikiran Michel Foucault menggugat asumsi tersebut secara radikal. Bagi Foucault, kebenaran tidak pernah berdiri di luar

sejarah, melainkan selalu diproduksi, didistribusikan, dan dilegitimasi melalui apa yang ia sebut sebagai regime of truth sebuah konfigurasi wacana, institusi, praktik sosial, dan relasi kuasa yang menentukan apa yang dapat dikatakan benar dan oleh siapa kebenaran itu diucapkan.

Konsep rezim kebenaran menandai pergeseran penting dalam filsafat pengetahuan. Kebenaran tidak lagi dipahami sebagai entitas universal yang otonom, tetapi sebagai hasil dari mekanisme kekuasaan yang bekerja secara produktif (Zaidan, 2020). Dalam kerangka ini, ilmu pengetahuan, hukum, agama, dan institusi sosial lainnya berfungsi sebagai aparatus yang menormalisasi cara berpikir dan berbicara tertentu. Wacana tidak sekadar merefleksikan realitas, melainkan membentuk realitas itu sendiri, termasuk dalam membangun subjek, norma, dan batas-batas makna yang sah (Salsabila et al., 2025) Di tengah dominasi rezim kebenaran yang dilembagakan tersebut, posisi sastra menjadi problematis sekaligus strategis. Sastra sering dipandang sebagai wilayah imajinasi, estetika, atau ekspresi subjektif yang berada di luar ranah kebenaran. Namun, dalam perspektif Foucauldian, pemisahan antara sastra dan kebenaran tidak bersifat alamiah, melainkan merupakan hasil dari konfigurasi wacana tertentu. Sastra justru beroperasi sebagai ruang diskursif yang unik: ia tidak sepenuhnya tunduk pada kriteria kebenaran ilmiah, tetapi juga tidak sepenuhnya terlepas dari relasi kuasa yang membentuk produksi makna.

Pemikiran Foucault menunjukkan bahwa setiap rezim kebenaran tidak hanya bekerja melalui larangan dan represi, melainkan melalui produksi diskursus yang tampak rasional dan alamiah. Kebenaran dipelihara melalui mekanisme seleksi apa yang boleh dibicarakan, bagaimana sesuatu dibicarakan, dan siapa yang berhak berbicara. Dalam konteks ini, bahasa menjadi instrumen utama kekuasaan, bukan sebagai alat netral, melainkan sebagai medan pertarungan makna (Syafiuddin, 2018). Sastra, yang sepenuhnya bergantung pada bahasa, dengan demikian tidak mungkin berada di luar jaringan kuasa tersebut. Namun, Foucault juga membuka kemungkinan lain: bahwa di dalam bahasa yang sama, terdapat potensi untuk pembalikan dan penyimpangan. Sastra, melalui gaya, metafora, ambiguitas, dan pelanggaran terhadap konvensi representasi, dapat menghadirkan bentuk ujaran yang tidak sepenuhnya dapat ditangkap oleh logika rezim kebenaran yang dominan. Ia tidak mengklaim kebenaran dalam pengertian ilmiah, tetapi justru menyingkap keterbatasan klaim kebenaran itu sendiri. Dalam pengertian ini, sastra bukan antitesis kebenaran, melainkan kritik imanen terhadap cara kebenaran diproduksi dan dilegitimasi (Rohanda, 2005).

Posisi sastra menjadi semakin signifikan jika dibaca melalui pendekatan genealogi Foucault. Genealogi tidak mencari asal-usul yang murni atau esensi tetap, melainkan menelusuri bagaimana praktik, konsep, dan institusi terbentuk melalui kontingenensi sejarah dan relasi kuasa (Ratna, 2013). Sastra, sebagai praktik diskursif, turut berpartisipasi dalam proses tersebut baik dengan mereproduksi norma yang ada maupun dengan mengganggunya. Dengan demikian, sastra dapat dipahami sebagai arsip alternatif yang merekam ketegangan antara kekuasaan dan kemungkinan perlawanan di tingkat wacana (Arianty et al., 2020). Dalam kerangka ini, sastra juga berkaitan erat dengan persoalan subjektivitas. Foucault menolak gagasan subjek sebagai entitas otonom yang mendahului bahasa dan kekuasaan. Subjek justru dibentuk melalui praktik diskursif yang menormalkan cara berpikir, merasakan, dan bertindak. Sastra, sebagai ruang eksperimentasi bahasa, membuka kemungkinan pembentukan subjektivitas yang tidak sepenuhnya patuh pada pola-pola dominan. Ia menghadirkan suara-suara yang terpinggirkan, bentuk-bentuk pengalaman yang tidak terartikulasikan dalam wacana resmi, serta cara-cara lain dalam memaknai diri dan dunia.

Selain itu, pembahasan mengenai posisi sastra dalam rezim kebenaran Foucauldian juga berkaitan dengan kritik atas modernitas. Proyek modernitas, dengan penekanannya pada rasionalitas, klasifikasi, dan normalisasi, cenderung memisahkan secara tegas antara pengetahuan yang sah dan yang tidak sah. Sastra sering kali ditempatkan di wilayah “yang tidak ilmiah”, sehingga kehilangan otoritas epistemiknya. Akan tetapi, justru melalui posisinya yang ambigu

tersebut, sastra dapat berfungsi sebagai cermin retak bagi rasionalitas modern—menampakkan apa yang disingkirkan, disenyapkan, atau dianggap tidak relevan oleh rezim kebenaran dominan.

Oleh karena itu, menempatkan sastra dalam pemikiran Foucault bukan sekadar soal mengaitkan teori kekuasaan dengan praktik estetika, melainkan usaha filosofis untuk memikirkan ulang hubungan antara kebenaran, bahasa, dan kebebasan. Sastra tidak diposisikan sebagai sumber kebenaran alternatif yang menggantikan ilmu pengetahuan, melainkan sebagai ruang kritis yang mempertanyakan fondasi epistemologis dari klaim-klaim kebenaran itu sendiri. Di sinilah relevansi filsafat Foucault bagi kajian sastra menemukan momentumnya: bukan untuk mengukuhkan sastra sebagai disiplin pengetahuan yang otonom, tetapi untuk memahami sastra sebagai praktik wacana yang terus-menerus bernegosiasi dengan kekuasaan.

Begitu pula, sastra dapat dipahami sebagai medan yang ambigu dalam rezim kebenaran. Di satu sisi, ia dapat direduksi sebagai wacana marginal yang tidak memiliki otoritas epistemik. Di sisi lain, justru karena posisinya yang tidak sepenuhnya dilembagakan, sastra memiliki potensi untuk mengganggu, meretakkan, atau menyingkap mekanisme kekuasaan yang tersembunyi di balik klaim-klaim kebenaran yang mapan. Sastra menjadi ruang di mana bahasa dapat berfungsi secara tidak patuh, melampaui normalisasi makna, dan membuka kemungkinan cara berpikir yang berbeda (Suci Novianti et al., 2025).

Artikel ini bertujuan untuk merefleksikan konsep rezim kebenaran dalam pemikiran Michel Foucault serta menelaah posisi sastra di dalamnya secara filosofis. Dengan menggunakan pendekatan konseptual dan hermeneutik, tulisan ini tidak berangkat dari analisis teks sastra tertentu, melainkan dari pembacaan atas gagasan-gagasan kunci Foucault tentang wacana, kekuasaan, dan kebenaran. Pertanyaan utama yang diajukan adalah: bagaimana sastra diposisikan dalam jaringan kuasa-pengetahuan menurut Foucault, dan sejauh mana sastra dapat dipahami sebagai ruang kritis terhadap rezim kebenaran modern? Melalui pembahasan ini, artikel diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi kajian filsafat sastra dengan menempatkan sastra bukan sekadar sebagai objek estetik, melainkan sebagai praktik wacana yang memiliki implikasi epistemologis dan politis. Dengan demikian, sastra tidak hanya dipahami sebagai cermin realitas, tetapi sebagai arena di mana kebenaran dinegosiasikan, dipersoalkan, dan bahkan dilawan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-filosofis dengan jenis penelitian studi kepustakaan (library research). Metodologi ini dipilih karena fokus kajian tidak terletak pada analisis objek sastra tertentu, melainkan pada penelusuran, pemaknaan, dan pengembangan gagasan konseptual Michel Foucault mengenai rezim kebenaran serta implikasinya terhadap posisi sastra dalam jaringan kuasa-pengetahuan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan hermeneutik-filosofis. Pendekatan konseptual bertujuan untuk mengidentifikasi, mengelaborasi, dan memetakan konsep-konsep kunci dalam pemikiran Foucault seperti discourse, power/knowledge, regime of truth, subjectivation, dan genealogy (Rohanda, 2016). Sementara itu, pendekatan hermeneutik digunakan untuk menafsirkan teks-teks filsafat Foucault secara kritis dengan memperhatikan konteks historis, epistemologis, dan problematik yang melatarbelakangi lahirnya konsep-konsep tersebut.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas dua jenis, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer meliputi karya-karya utama Michel Foucault, terutama yang berkaitan dengan persoalan kebenaran, wacana, dan kekuasaan, seperti *The Archaeology of Knowledge*, *Discipline and Punish*, *Power/Knowledge*, serta *The History of Sexuality*. Sumber sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan tulisan ilmiah lain yang membahas pemikiran Foucault, filsafat sastra, serta relasi antara sastra, bahasa, dan kekuasaan. Sumber sekunder digunakan untuk

memperkaya perspektif, memperkuat argumen, dan memposisikan penelitian ini dalam diskursus akademik yang lebih luas.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik pembacaan kritis dan selektif terhadap teks-teks filosofis yang relevan. Proses ini melibatkan pencatatan konsep, argumen, serta relasi antar gagasan yang berkaitan dengan rezim kebenaran dan posisi sastra. Pembacaan tidak dilakukan secara deskriptif semata, melainkan secara analitis-kritis untuk menyingkap asumsi epistemologis dan implikasi politis dari pemikiran yang dibahas. Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan utama. Pertama, eksplorasi konseptual, yaitu mengidentifikasi dan mendefinisikan konsep-konsep kunci dalam pemikiran Foucault yang relevan dengan tema penelitian. Kedua, analisis relasional, yaitu menelaah keterkaitan antara konsep rezim kebenaran dengan wacana sastra sebagai praktik diskursif. Ketiga, refleksi kritis, yaitu mengevaluasi posisi sastra dalam kerangka Foucauldian serta menyoroti potensi sastra sebagai ruang kritik terhadap mekanisme produksi kebenaran yang dominan.

Analisis ini tidak bertujuan untuk menarik generalisasi empiris, melainkan untuk membangun argumentasi filosofis yang koheren dan sistematis. Dengan demikian, validitas penelitian ini terletak pada konsistensi logis, ketepatan interpretasi, dan kedalaman refleksi teoretis. Penelitian ini dibatasi pada pembahasan pemikiran Michel Foucault dan tidak dimaksudkan untuk membandingkannya secara langsung dengan pemikir lain atau mengaplikasikannya pada analisis teks sastra tertentu. Pembatasan ini dilakukan untuk menjaga fokus kajian pada refleksi filosofis mengenai rezim kebenaran dan posisi sastra sebagai praktik wacana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

. 1. Rezim Kebenaran sebagai Mekanisme Produksi Makna

Hasil pembacaan konseptual terhadap pemikiran Michel Foucault menunjukkan bahwa kebenaran, dalam kerangka Foucauldian, tidak pernah bersifat netral atau transenden. Kebenaran selalu terikat pada kondisi historis tertentu dan bekerja melalui mekanisme sosial-politik yang konkret. Foucault secara eksplisit menolak gagasan bahwa kebenaran adalah sesuatu yang berada di luar kekuasaan. Ia menyatakan:

“Truth is not outside power, or lacking in power... truth is a thing of this world: it is produced only by virtue of multiple forms of constraint.” (Foucault, 1980).

Pernyataan ini menegaskan bahwa kebenaran bukanlah hasil korespondensi murni antara bahasa dan realitas, melainkan efek dari relasi kuasa yang mengatur produksi, sirkulasi, dan legitimasi wacana. Rezim kebenaran (regime of truth) berfungsi sebagai seperangkat prosedur yang menentukan: apa yang dianggap benar, siapa yang berhak berbicara, serta institusi apa yang memiliki otoritas epistemik.

Bayangkan sejenak bahwa selama ini kita keliru dalam memandang "kebenaran". Kita sering menganggap kebenaran sebagai sebuah permata tersembunyi yang murni, tergeletak di alam semesta, menunggu untuk ditemukan oleh pikiran yang jernih dan bahasa yang tepat. Kita membayangkan bahwa jika kita membersihkan kabut ideologi dan kepentingan politik, maka kebenaran yang sejati akan bersinar dengan sendirinya. Namun, bagi Michel Foucault, pandangan romantis ini adalah ilusi terbesar sejarah pemikiran manusia. Dalam karyanya Power/Knowledge (1980), ia mengajak kita menapaki realitas yang jauh lebih keras dan pragmatis: bahwa kebenaran tidak pernah duduk di luar kekuasaan, melainkan "benda dunia" yang diproduksi di dalam lumpur pergulatan sosial. Kebenaran, dalam narasi Foucault, bukanlah sebuah cermin yang memantulkan realitas secara sempurna tanpa cacat. Sebaliknya, kebenaran adalah sebuah "efek" atau hasil produksi. Layaknya sebuah pabrik, masyarakat memiliki mekanisme raksasa yang bekerja siang dan malam untuk memilah, menyaring, dan akhirnya mencetak label "benar" pada gagasan tertentu, sembari membuang gagasan lain ke tong sampah

"kesalahan" atau "ketidakwarasan". Proses seleksi ini tidak terjadi secara alamiah, melainkan diatur oleh apa yang disebut Foucault sebagai "Rezim Kebenaran".

Rezim ini bekerja seperti arsitektur tak kasat mata yang menentukan aturan main. Ia menetapkan prosedur-prosedur ketat tentang bagaimana sebuah pernyataan bisa divalidasi. Di era modern kita, misalnya, rezim ini menempatkan sains dan data statistik di puncak hierarki. Sebuah pernyataan baru akan dianggap "benar" jika ia lulus uji laboratorium, memiliki catatan kaki, atau didukung oleh angka-angka. Tanpa prosedur ini meskipun mungkin memiliki nilai kearifan yang dalam sebuah wacana akan sulit mendapatkan status sebagai kebenaran. Rezim inilah yang mendiktukan "tata cara" bagi realitas untuk menampakkan dirinya.

Narasi tentang kebenaran ini tidak bisa dipisahkan dari siapa yang memegang stempel otoritas. Dalam panggung sosial, tidak semua orang memiliki hak suara yang sama. Rezim kebenaran menentukan siapa yang memiliki otoritas epistemik siapa yang "boleh" bicara dan didengarkan. Ketika seorang dokter berbicara tentang kesehatan, seorang hakim berbicara tentang keadilan, atau seorang ilmuwan berbicara tentang iklim, ucapan mereka seketika berubah menjadi fakta. Mereka adalah agen-agen yang diberi mandat oleh institusi universitas, rumah sakit, pengadilan untuk memproduksi kebenaran. Di sini, kita melihat bahwa apa yang kita terima sebagai fakta sering kali hanyalah opini yang telah diberi seragam dinas dan legitimasi institusional.

Puncaknya, hubungan ini membentuk sebuah siklus yang tak terputus. Kekuasaan membutuhkan kebenaran untuk melegitimasi tindakannya; seorang penguasa tidak bisa sekadar menindas, ia butuh ilmu hukum, sosiologi, atau ekonomi untuk membenarkan kebijakannya sebagai sesuatu yang "rasional" dan "perlu". Sebaliknya, produksi pengetahuan membutuhkan kekuasaan; riset butuh dana, universitas butuh izin negara, dan sirkulasi buku butuh pasar. Jadi, kebenaran dan kekuasaan saling memproduksi dan memperkuat satu sama lain. Dengan demikian, memahami kebenaran bukan lagi soal mencari kesesuaian antara kata dan benda, melainkan memahami pertarungan politik. Setiap kali kita bertanya "apakah ini benar?", Foucault menyarankan kita untuk bertanya lebih jauh: "siapa yang diuntungkan jika hal ini dianggap benar?" dan "prosedur kekuasaan apa yang memungkinkan hal ini hadir sebagai kebenaran?".

Dalam konteks ini, kebenaran bersifat operasional. Ia bekerja bukan terutama untuk mengungkap realitas, tetapi untuk mengatur realitas. Sebagaimana ditegaskan Foucault:

"Each society has its regime of truth, its 'general politics' of truth." (Foucault, Power/Knowledge, 1980), Kutipan ini menunjukkan bahwa rezim kebenaran bukan sekadar konsep abstrak, melainkan struktur aktif yang membentuk horizon berpikir masyarakat. Kebenaran menjadi norma, dan norma tersebut berfungsi sebagai instrumen normalisasi.

2. Wacana dan Sastra sebagai Formasi Diskursif

Dalam The Archaeology of Knowledge, Foucault memperkenalkan konsep formasi diskursif, yakni sistem aturan yang memungkinkan munculnya pernyataan-pernyataan tertentu dalam periode historis tertentu. Wacana tidak dipahami sebagai kumpulan teks, melainkan sebagai praktik yang menghasilkan objek, subjek, dan kebenaran.

"Discourses are not about objects; they do not identify objects, they constitute them." (Foucault, 1972).

Dalam kerangka ini, sastra tidak dapat direduksi menjadi ekspresi individual pengarang atau sekadar representasi realitas sosial. Sastra merupakan praktik diskursif yang beroperasi di dalam dan sekaligus di pinggiran rezim kebenaran. Ia tunduk pada aturan bahasa dan pengetahuan zamannya, namun tidak sepenuhnya dikendalikan oleh logika epistemik ilmiah. Hasil refleksi konseptual menunjukkan bahwa posisi sastra bersifat ambivalen. Di satu sisi, sastra

berada dalam jaringan wacana yang sama dengan pengetahuan lain. Di sisi lain, sastra mengganggu stabilitas wacana tersebut melalui ambiguitas, metafora, dan penyimpangan makna.

Terry Eagleton menegaskan hal ini dengan menyatakan: "*Literature is not innocent: it is deeply implicated in the structures of power that produce it.*" (Eagleton, 1983).

Namun keterlibatan sastra dalam struktur kuasa tidak identik dengan kepatuhan total. Justru dalam ketegangan inilah posisi kritis sastra dapat dipahami. Mari kita menelusuri pemikiran Michel Foucault dalam *The Archaeology of Knowledge* dengan mengubah cara pandang kita terhadap bahasa. Selama ini, kita sering menganggap bahasa hanya sebagai alat netral untuk menunjuk benda-benda yang sudah ada di sekeliling kita seolah-olah dunia ini sudah lengkap dengan labelnya, dan tugas kita hanya membacanya. Namun, Foucault membalik logika ini melalui konsep "formasi diskursif". Ia mengajak kita memahami bahwa wacana bukanlah sekadar kumpulan teks atau pidato, melainkan sebuah sistem aturan tak kasat mata yang bekerja di balik layar sejarah. Sistem inilah yang menentukan apa yang bisa dikatakan dan apa yang harus dibungkam pada era tertentu.

Dalam pandangan ini, wacana memiliki kekuatan yang jauh lebih "mengerikan" dan kreatif: ia tidak menunjuk objek, melainkan menciptakannya. Sebuah objek pengetahuan misalnya "kriminalitas" atau "kegilaan" tidak serta-merta ada begitu saja di alam sebagai fakta baku. Ia baru mewujud sebagai objek yang bisa dipelajari dan ditangani ketika wacana (hukum, medis, psikologi) membentuk batasan-batasannya, memberinya nama, dan mengaturnya dalam hierarki ilmu. Jadi, ketika kita berbicara, kita tidak sedang mendeskripsikan dunia, tetapi kita sedang mengonstruksi dunia itu sendiri melalui aturan-aturan main yang berlaku di zaman kita.

Lantas, di mana posisi sastra dalam mesin raksasa pembentuk realitas ini? Dalam kerangka berpikir Foucault, kita harus berhenti melihat sastra secara romantis hanya sebagai curahan hati seorang jenius yang kesepian atau sekadar cermin yang memantulkan kondisi sosial masyarakat. Sastra adalah sebuah praktik diskursif sebuah tindakan berbahasa yang terikat kuat pada zamannya. Sebuah novel atau puisi tidak lahir dari ruang hampa; ia disusun dari bahan-bahan yang disediakan oleh zamannya: bahasa yang tersedia, nilai moral yang berlaku, dan batas-batas pengetahuan yang ada saat itu. Sastra bernapas dalam udara yang sama dengan hukum, sains, dan agama.

Namun, di sinilah letak keunikan dan paradoks sastra yang membuatnya berbeda dari wacana ilmiah. Jika wacana ilmiah (seperti biologi atau sosiologi) bekerja keras untuk menstabilkan makna memastikan A adalah A dan bukan B maka sastra justru bermain-main di zona ambiguitas. Sastra menduduki posisi yang ambivalen atau mendua. Di satu sisi, ia adalah "anak kandung" dari rezim kebenaran zamannya karena ia menggunakan bahasa dan struktur yang sama. Namun di sisi lain, sastra adalah "anak pembangkang" yang terus-menerus mengganggu kemapanan tersebut. Melalui metafora, fiksi, dan permainan kata, sastra menyusup ke dalam aturan bahasa yang kaku dan membelokkan maknanya. Ia berada di dalam sistem, tapi kakinya berpijak di pinggiran, selalu siap untuk menggelincirkan kepastian yang dibangun oleh kekuasaan. Hal inilah yang dipertegas oleh Terry Eagleton ketika ia mengingatkan kita bahwa sastra "tidaklah polos" (not innocent). Kita tidak bisa memandang karya sastra sebagai benda suci yang terpisah dari kotornya politik duniawi. Sastra sangat terlibat, bahkan berlumuran dengan struktur kekuasaan yang memproduksinya. Ia dibentuk oleh ideologi kelas, gender, dan institusi pendidikan yang melegitiminasinya. Namun, pernyataan bahwa sastra "terlibat dalam kekuasaan" tidak berarti sastra tunduk sepenuhnya atau menjadi budak kekuasaan.

Justru dalam ketidakpolosan itulah kekuatan kritis sastra muncul. Karena ia lahir dari dalam perut kekuasaan namun memiliki lisensi untuk berimajinasi (fiksi), sastra mampu menyingkap apa yang disembunyikan oleh wacana resmi. Ia bisa menuruti aturan main hanya untuk memparodikannya, atau menggunakan bahasa penguasa untuk menceritakan penderitaan yang dibungkam. Sastra menjadi ruang di mana "kebenaran" yang mapan diuji, diguncang, dan

dipertanyakan, bukan dengan menolaknya dari luar, melainkan dengan membongkarnya dari dalam.

3. Sastra dan Kritik terhadap Klaim Kebenaran Modern

Hasil bacaan memperlihatkan bahwa dalam rezim kebenaran modern yang ditandai oleh rasionalitas ilmiah, klasifikasi, dan objektivitas sastra sering ditempatkan sebagai wacana "non-kognitif". Sastra dianggap tidak menghasilkan pengetahuan yang sah. Namun, dalam perspektif Foucauldian, perbedaan tersebut merupakan efek dari kekuasaan epistemik modern.

Foucault sendiri mengkritik modernitas karena obsesinya terhadap klasifikasi dan normalisasi. Dalam *Discipline and Punish*, ia menunjukkan bagaimana rasionalitas modern bekerja melalui teknik-teknik pengawasan dan regulasi:

"Discipline produces subjected and practiced bodies." (Foucault, 1976)

Sastra, dalam konteks ini, dapat dibaca sebagai praktik bahasa yang menolak disiplin makna. Ia tidak tunduk sepenuhnya pada tuntutan koherensi, verifikasi, dan utilitas. Oleh karena itu, sastra berpotensi membuka ruang refleksi kritis terhadap klaim kebenaran yang mapan.

Paul Rabinow menafsirkan posisi ini dengan menyatakan: "*Foucault's critique does not replace truth with fiction, but destabilizes the conditions under which truth claims are made.*" (Rabinow, *The Foucault Reader*, 1984)

Dalam panggung peradaban modern yang kita huni saat ini, terdapat sebuah garis demarkasi yang tegas dan sering kali kejam: pemisahan antara "pengetahuan yang serius" dan "sekadar hiburan". Rezim kebenaran modern, yang sangat mendewakan rasionalitas ilmiah, data terukur, dan objektivitas, cenderung memandang sastra dengan sebelah mata. Sastra sering kali diposisikan sebagai wacana "non-kognitif" sesuatu yang indah untuk dinikmati di waktu senggang, tetapi dianggap tidak menyumbangkan pengetahuan yang sah atau valid tentang realitas. Novel dan puisi dianggap sebagai bunga tidur, sementara laporan lab dan statistik dianggap sebagai cermin dunia nyata. Namun, jika kita meminjam kacamata Michel Foucault, perbedaan tajam ini bukanlah sebuah fakta alamiah, melainkan sebuah efek dari bekerjanya kekuasaan epistemik modern yang ingin memonopoli definisi kebenaran.

Foucault mengajak kita untuk mencurigai obsesi modernitas terhadap ketertiban. Dalam karyanya *Discipline and Punish*, ia membongkar bagaimana masyarakat modern dibangun di atas hasrat untuk mengawasi, mengklasifikasikan, dan mendisiplinkan segala hal. Ia menunjukkan bahwa rasionalitas modern bekerja layaknya sebuah penjara panoptikon atau barak militer: tujuannya adalah menghasilkan tubuh-tubuh yang patuh dan terlatih (*subjected and practiced bodies*). Namun, pendisiplinan ini tidak hanya berlaku pada tubuh fisik manusia, melainkan juga pada bahasa dan pikiran. Bahasa yang "benar" menurut standar modern adalah bahasa yang efisien, transparan, tunggal maknanya, dan produktif secara ekonomi. Segala bentuk bahasa yang tidak memenuhi kriteria tersebut harus dipenggiring atau dilabeli sebagai tidak rasional.

Di sinilah sastra hadir sebagai anomali yang menantang. Sastra bisa dibaca sebagai sebuah praktik bahasa yang "mangkir" atau menolak untuk didisiplinkan. Ketika wacana ilmiah menuntut kepastian dan ketunggalan makna, sastra justru merayakan ambiguitas dan metafora. Ketika birokrasi menuntut kegunaan (utilitas) yang praktis, sastra sering kali hadir tanpa tujuan praktis yang jelas selain untuk merenung atau bermain-main dengan imajinasi. Sastra adalah pemberontakan sunyi terhadap "polisi bahasa" yang ingin membekukan makna. Karena ia tidak tunduk sepenuhnya pada tuntutan verifikasi dan koherensi logis yang kaku, sastra memiliki keleluasaan untuk menyelinap ke wilayah-wilayah yang tidak bisa dijangkau oleh sains.

Namun, penting untuk memahami penafsiran Paul Rabinow agar kita tidak terjebak dalam nihilisme. Kritik yang dilancarkan Foucault dan peran yang dimainkan sastra bukanlah upaya untuk menggantikan "kebenaran" dengan "kebohongan" atau fiksi semata. Tujuannya bukan

untuk mengatakan bahwa sains itu salah dan novel itu benar. Sebaliknya, sastra berfungsi untuk menggoyahkan fondasi atau kondisi-kondisi yang memungkinkan sebuah klaim kebenaran dibuat (destabilizes the conditions under which truth claims are made). Sastra tidak menawarkan tandingan fakta, melainkan menawarkan tandingan perspektif.

Dengan demikian, sastra tidak beroperasi sebagai pengganti ilmu pengetahuan, melainkan bertindak sebagai medan kritik epistemologis yang tajam. Ia memaksa kita untuk berhenti sejenak dan bertanya: Mengapa kita hanya mempercayai satu jenis kebenaran? Apa yang hilang ketika segala sesuatu harus diukur dengan angka? Sastra membuka ruang refleksi kritis, mengingatkan kita bahwa di balik tembok kokoh rasionalitas modern, terdapat kerumitan pengalaman manusia yang tidak akan pernah bisa sepenuhnya didisiplinkan atau diklasifikasikan.

4. Subjektivitas, Sastra, dan Teknologi Diri

Coretan selanjutnya menunjukkan bahwa sastra memiliki keterkaitan erat dengan konsep subjektivasi dalam pemikiran Foucault. Subjek tidak dipahami sebagai entitas otonom, melainkan sebagai hasil dari praktik diskursif dan teknologi kekuasaan.

"The subject is constituted through practices of subjection." (Foucault, Power/Knowledge, 1980)

Sastra, sebagai ruang eksperimentasi bahasa dan pengalaman, memungkinkan pembentukan subjektivitas yang tidak sepenuhnya patuh pada norma dominan. Ia menjadi medium untuk mengekspresikan pengalaman yang tidak terakomodasi dalam wacana resmi. Dalam karya-karya akhir Foucault, terutama tentang technologies of the self, terdapat peluang untuk membaca sastra sebagai praktik reflektif: Technologies of the self permit individuals to effect by their own means a certain number of operations on their own bodies and souls." (Foucault, Technologies of the Self, 1988)

Melangkah lebih dalam ke hasil analisis ini, kita sampai pada pemahaman yang mengubah cara kita memandang diri kita sendiri sebagai manusia. Selama ini, kita mungkin terbuai oleh ilusi humanisme liberal yang meyakini bahwa "Subjek" atau "Diri" adalah entitas yang otonom seorang kapten yang memegang kendali penuh atas jiwanya, bebas dari campur tangan luar. Namun, Foucault meruntuhkan benteng keyakinan ini. Dalam pandangannya, apa yang kita sebut sebagai "aku" bukanlah titik awal yang murni, melainkan sebuah produk akhir. Subjek dibentuk, dicetak, dan dilahirkan melalui praktik diskursif dan teknologi kekuasaan yang melingkapinya. Kita adalah hasil dari sejarah, dididik oleh sekolah, didisiplinkan oleh hukum, dan dibentuk oleh norma sosial. Sebagaimana ditegaskan Foucault dalam Power/Knowledge, subjek dikonstitusi melalui praktik penundukan (practices of subjection). Artinya, kita menjadi "seseorang" justru karena kita tunduk pada aturan-aturan yang mendefinisikan siapa kita.

Di tengah kepungan mekanisme pembentukan subjek yang kaku ini, sastra hadir menawarkan sebuah ruang napas yang vital. Jika wacana resmi (seperti hukum atau administrasi negara) berusaha mencetak kita menjadi warga yang seragam dan patuh, sastra justru menjadi laboratorium eksperimentasi bagi jiwa. Di halaman-halaman karya sastra, bahasa tidak digunakan untuk mendikte, melainkan untuk menjelajah kemungkinan-kemungkinan eksistensi yang lain. Sastra memungkinkan munculnya bentuk-bentuk subjektivitas yang liar, yang tidak sepenuhnya tunduk pada norma dominan. Ia menjadi corong bagi pengalaman-pengalaman yang terpinggirkan, emosi yang dianggap irasional, atau identitas yang tidak memiliki tempat dalam kamus resmi masyarakat. Sastra memberi suara pada sisi kemanusiaan yang sering kali dibungkam oleh kekuasaan.

Namun, narasi ini tidak berhenti pada kepasrahan atau sekadar pelarian. Dalam fase pemikirannya yang lebih matang, Foucault bergeser dari melihat manusia semata-mata sebagai objek yang dibentuk kekuasaan, menuju manusia sebagai subjek yang mampu membentuk dirinya sendiri. Ia memperkenalkan konsep technologies of the self atau teknologi diri. Ini adalah

sebuah titik balik yang krusial. Foucault menyadari bahwa individu memiliki kapasitas untuk melakukan operasi pada tubuh dan jiwanya sendiri—sebuah upaya sadar untuk mengubah diri, memurnikan hati, atau mencapai tingkat kebijaksanaan tertentu. Kekuasaan tidak lagi dilihat hanya sebagai tekanan dari atas ke bawah, tetapi juga melibatkan bagaimana kita merespons dan mengelola diri kita di hadapan kekuasaan tersebut.

Dalam kerangka inilah, sastra menemukan peran barunya yang sangat strategis sebagai sebuah praktik reflektif. Sastra bukan lagi sekadar hiburan pasif, melainkan sebuah "teknologi diri" yang ampuh. Melalui tindakan menulis dan membaca secara mendalam, seseorang sedang melakukan kerja rohani terhadap dirinya sendiri. Sastra menjadi cermin retak yang memungkinkan subjek untuk melihat kembali posisi dirinya: "Apakah nilai yang saya pegang ini benar-benar milik saya, atau titipan penguasa?". Dengan menuliskan pengalaman atau merenungkan narasi fiksi, seseorang sedang menegosiasikan ulang hubungan dirinya dengan kebenaran. Sastra menjadi sarana asketis, sebuah latihan spiritual sekuler yang memungkinkan individu untuk tidak sekadar menjadi produk cetakan pabrik sosial, tetapi menjadi pengrajin bagi jiwanya sendiri.

5. Sastra sebagai Arsip Alternatif

Salah satu temuan konseptual penting dalam tulisan ini adalah pemahaman sastra sebagai arsip alternatif. Berbeda dari arsip resmi yang merekam pengetahuan dominan, sastra menyimpan jejak-jejak wacana yang terpinggirkan, ambigu, dan kontradiktif.

Foucault menekankan bahwa arsip bukan sekadar kumpulan dokumen, melainkan sistem yang mengatur apa yang dapat dikatakan: "The archive is the law of what can be said." (Foucault, *The Archaeology of Knowledge*, 1972) Salah satu konseptual yang paling menggugah dalam penelusuran ini adalah perubahan cara kita memandang "memori" sebuah peradaban. Kita terbiasa menganggap arsip sebagai deretan lemari besi di kantor pemerintahan, berisi dokumen-dokumen resmi yang stempelnya basah dan bahasanya baku. Namun, Michel Foucault dalam *The Archaeology of Knowledge* mengajak kita membongkar definisi fisik tersebut. Bagi Foucault, arsip bukanlah sekadar gudang penyimpanan kertas, melainkan sebuah sistem abstrak atau "hukum" yang mengatur apa yang bisa dikatakan dan apa yang harus disembunyikan dalam satu periode sejarah. Arsip adalah mekanisme seleksi raksasa yang menentukan kalimat mana yang layak didengar dan kalimat mana yang harus lenyap ditelan angin.

Dalam lanskap yang ketat inilah, sastra hadir mengambil peran yang unik dan vital sebagai "arsip alternatif". Jika arsip resmi bertugas mencatat sejarah para pemenang mereka yang memiliki kuasa, rasionalitas, dan legitimasi maka sastra sering kali menjadi penampung bagi sisasiswa yang tercecer. Arsip resmi cenderung menyukai keteraturan, logika yang lurus, dan data yang bersih dari emosi. Sebaliknya, sastra justru merangkul yang retak, yang ambigu, dan yang kontradiktif. Ia menyimpan jejak-jejak suara yang terpinggirkan: bisikan ketakutan yang tak tercatat dalam laporan militer, kegelisahan batin yang tak masuk dalam sensus penduduk, atau ironi kehidupan yang terlalu rumit untuk diringkas dalam pidato kenegaraan.

Posisi sastra dalam peta pengetahuan ini sungguh menarik karena ia beroperasi di wilayah perbatasan yang remang-remang. Sastra tidak sepenuhnya berada di "dalam" arsip resmi karena ia sering kali melanggar aturan objektivitas, namun ia juga tidak sepenuhnya berada di "luar" karena ia tetap menggunakan bahasa zamannya. Ia berdiri tepat di ambang pintu, di garis batas antara yang terucap dan yang tak terucap. Di posisi liminal inilah sastra merekam ketegangan-ketegangan zaman. Ia menangkap momen ketika sebuah kebenaran mulai goyah, atau ketika sebuah suara berusaha menembus tembok pembungkaman. Dengan demikian, membaca sastra sebagai arsip alternatif berarti kita sedang membaca sisi gelap atau sisi bawah sadar dari sebuah zaman. Sastra menyelamatkan hal-hal yang oleh sistem kekuasaan dianggap sebagai "sampah" atau "gangguan", lalu merawatnya menjadi kesaksian abadi. Ia mengingatkan kita bahwa di balik narasi besar sejarah yang tampak mulus dan utuh, selalu ada retakan-retakan kecil berisi manusia-

manusia yang bergulat dengan nasibnya dan justru di dalam retakan itulah sering kali tersimpan kebenaran yang paling jujur.

6. Implikasi Filosofis: Sastra dan Praksis Kebebasan

Pembahasan ini menunjukkan bahwa sastra, dalam perspektif Foucauldian, tidak dapat dipahami secara naif sebagai ruang kebebasan absolut. Namun, sastra membuka kemungkinan praksis kebebasan melalui problematisasi kebenaran.

Sebagaimana ditegaskan Foucault: "Critique is the art of not being governed quite so much." (Haugaard, 2022).

Akhirnya, perjalanan menelusuri pemikiran Foucault ini membawa kita pada sebuah kesimpulan yang menuntut kedewasaan intelektual. Kita harus melepaskan pandangan romantis yang naif, yang selama ini membayangkan sastra sebagai "zona bebas" yang suci seolah-olah ketika seorang penulis berkarya, ia sepenuhnya lepas dari cengkeraman kekuasaan dunia. Foucault mengingatkan kita bahwa tidak ada ruang yang benar-benar steril dari kekuasaan; bahkan dalam bait puisi yang paling sunyi sekalipun, gema ideologi dan struktur bahasa zaman itu tetap terdengar. Sastra tidak berdiri di luar dunia, ia teranyam di dalamnya.

Namun, pengakuan bahwa sastra "tidak sepenuhnya bebas" bukan berarti sastra tidak berdaya. Justru di sinilah letak keindahan dari apa yang disebut Foucault sebagai "praksis kebebasan". Kebebasan dalam kamus Foucault bukanlah kondisi lepas tanpa aturan, melainkan sebuah sikap, sebuah etos. Mengutip pernyataannya yang terkenal dalam *What Is Critique?*, kritik adalah "seni untuk tidak diperintah sedemikian rupa" (the art of not being governed quite so much). Perhatikan nuansanya: ia tidak mengatakan "tidak diperintah sama sekali", tetapi "tidak diperintah sedemikian rupa". Artinya, kritik adalah upaya terus-menerus untuk menawar, menggeser, dan mempertanyakan cara kita diatur. Sastra mengambil peran vital dalam seni ketidakpatuhan ini. Ia tidak melawan kekuasaan dengan konfrontasi frontal atau teriakan slogan yang sering kali justru mudah dipatahkan melainkan dengan cara yang jauh lebih halus dan subversif: melalui penggeseran makna. Ketika rezim kebenaran berusaha membekukan makna kata-kata agar masyarakat mudah dikontrol, sastra justru mencairkannya kembali. Ia menyusup ke dalam bahasa kekuasaan, menggunakan kosa katanya, namun membelokkan tujuannya. Sastra menciptakan keraguan di tempat di mana penguasa menginginkan kepastian.

Dengan demikian, kita sampai pada inti dari posisi sastra yang bersifat dialektis. Sastra adalah sosok bermuka dua yang unik dalam jaringan kuasa-pengetahuan. Di satu sisi, ia adalah bagian dari sistem; ia hidup dalam struktur bahasa dan institusi sosial yang sama dengan wacana lainnya. Namun di sisi lain, ia menyimpan potensi ledak kritis yang mampu menelanjangi mekanisme produksi kebenaran itu sendiri. Sastra mungkin tidak menghasilkan "kebenaran ilmiah" seperti halnya fisika atau sosiologi, dan memang bukan itu tugasnya. Tugas mulia sastra adalah menjadi "pengganggu"; ia hadir untuk menggoyahkan klaim-klaim kebenaran yang mapan, memaksa kita menyadari bahwa apa yang kita anggap "normal" dan "benar" hanyalah konstruksi rapuh yang dipertahankan oleh kekuasaan. Melalui praktik bahasa yang nakal dan tak patuh, sastra menjaga kesadaran kita tetap terjaga.

.KESIMPULAN

Artikel ini menegaskan bahwa dalam pemikiran Michel Foucault, kebenaran tidak pernah berdiri sebagai entitas yang netral, universal, atau transhistoris. Kebenaran selalu bekerja di dalam apa yang disebut sebagai rezim kebenaran, yakni konfigurasi wacana, institusi, dan praktik kekuasaan yang menentukan apa yang dapat dikatakan benar, siapa yang berhak mengatakannya, serta bagaimana kebenaran tersebut disirkulasikan dan dilegitimasi. Dengan

kerangka ini, kebenaran dipahami bukan sebagai cerminan realitas, melainkan sebagai hasil dari relasi kuasa-pengetahuan yang bersifat produktif dan normalisatif. Dalam konteks tersebut, sastra menempati posisi yang ambivalen sekaligus strategis. Sastra tidak berada di luar rezim kebenaran, sebab ia beroperasi melalui bahasa yang sama dan lahir dari kondisi historis yang serupa dengan wacana lain. Namun, sastra juga tidak sepenuhnya tunduk pada logika epistemik yang mengatur pengetahuan ilmiah dan institusional. Ketidakpatuhan sastra terhadap tuntutan koherensi, verifikasi, dan utilitas menjadikannya ruang diskursif yang mampu mengganggu stabilitas klaim-klaim kebenaran yang mapan. Pembahasan ini menunjukkan bahwa sastra, dalam perspektif Foucauldian, tidak dapat direduksi sebagai sekadar ekspresi estetis atau hiburan imajinatif. Sastra merupakan praktik wacana yang memiliki implikasi epistemologis dan politis. Melalui ambiguitas, metafora, dan penyimpangan bahasa, sastra menyingkap mekanisme kekuasaan yang bekerja di balik produksi kebenaran serta membuka kemungkinan pembentukan subjektivitas yang tidak sepenuhnya patuh pada norma dominan. Dalam pengertian ini, sastra dapat dipahami sebagai ruang di mana kebenaran tidak ditetapkan, melainkan dipersoalkan. Lebih jauh, artikel ini memperlihatkan bahwa sastra berfungsi sebagai arsip alternatif yang merekam pengalaman, suara, dan makna yang sering kali disingkirkan oleh rezim kebenaran resmi. Sastra tidak menawarkan kebenaran tandingan dalam pengertian absolut, tetapi menghadirkan kritik imanen terhadap cara kebenaran diproduksi dan dioperasikan. Dengan demikian, sastra berkontribusi pada apa yang oleh Foucault disebut sebagai praktik kritik—yakni upaya untuk tidak sepenuhnya tunduk pada cara-cara tertentu dalam diperintah oleh kebenaran. Sebagai refleksi akhir, kajian ini menempatkan sastra sebagai salah satu kemungkinan praksis kebebasan dalam pemikiran Foucault. Kebebasan di sini tidak dipahami sebagai pembebasan total dari kekuasaan, melainkan sebagai kemampuan untuk terus-menerus memproblematasi relasi antara bahasa, kebenaran, dan subjek. Dengan menempatkan sastra dalam horizon ini, artikel ini berharap dapat memperkaya kajian filsafat sastra dan membuka ruang pemikiran kritis tentang peran sastra dalam menghadapi rezim kebenaran modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Arianty, M. W., Rohanda, R., & Budiharjo, I. G. (2020). Ideologi Patriarki dalam Novel Wa Nasitu Anni Imra'ah Karya Ihsan Abdul Quddus. *Hijai-Journal on Arabic Language and Literature*, 3(1), 10–27.
- Eagleton, T. (1983). *Literary Theory: An Introduction*. Basil Blackwell Ltd.
- Foucault, M. (1972). *The Archaeology of Knowledge*. Pantheon Books.
- Foucault, M. (1976). *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. Vintage Books.
- Foucault, M. (1980). *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972–1977*. Pantheon Books.
- Haugaard, M. (2022). Foucault and Power: A Critique and Retheorization. *Critical Review*, 34(3–4), 341–371. <https://doi.org/10.1080/08913811.2022.2133803>
- Ratna, N. K. (2013). *Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra: Dari Strukturalisme hingga Postrukturalisme Wacana Feminisme*. Pustaka Pelajar.
- Rohanda, R. (2005). *Model Penelitian Sastra Interdisipliner*. Adabi Press.
- Rohanda, R. (2016). *Metode Penelitian Sastra: Teori, Metode, Pendekatan, dan Praktik*. LP2M UIN Sunan Guung Djati.
- Salsabila, S., Rohanda, R., & Kodir, A. (2025). Ilmu Mantik Perspektif Filsafat Ilmu Kajian

**Journal for the study of language, Literature, Culture and The Humanities, 1
(1), 82-93, 2026**

Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi. *Ihtimam: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab*, 8(01), 219–237.

- Suci Novianti, W., Rohanda, R., Fauziah, I., & Alandira, P. (2025). Hierarchy of Needs of the Main Character in Habiburrahman El Shirazy's Ayat-Ayat Cinta: A Study of Abraham Maslow's Psychology. *ELS Journal on Interdisciplinary Studies in Humanities*, 8(2 SE-Articles), 353–369. <https://doi.org/10.34050/els-jish.v8i2.44340>
- Syafiuddin, A. (2018). Pengaruh kekuasaan atas pengetahuan (memahami teori relasi kuasa Michel Foucault). *Refleksi Jurnal Filsafat Dan Pemikiran Islam*, 18(2), 141–155.
- Zaidan, Y. F. (2020). Kritik Sandra Lee Bartky Terhadap Pemikiran Michel Foucault. *JAQFI: Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam*, 5(2), 134–153.